

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 adalah: *Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur*. Visi pembangunan jangka panjang nasional tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yakni:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Arah kebijakan RPJP Nasional tahun 2005-2025 terbagi dalam 5 tahun periodisasi RPJM Nasional. Berikut arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dalam periodisasi yang mengarahkan RPJMD dalam kurun waktu 2013-2018.

1. RPJM Nasional Periode 2 (2010 – 2014)

RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik, meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya

peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.

3. RPJM Nasional Periode 3 (2015 – 2020)

Tujuan tahap ini adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri makin menguat. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial.

Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya

pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya

Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

7.2. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Visi Indonesia 2010 - 2014 Adalah Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan. Perwujudan visi indonesia dijabarkan dalam beberapa misi pemerintah sebagai berikut:

Misi 1 : Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Misi 2 : Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Misi 3 : Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakan Hukum

7.2.1 Prioritas Nasional

Untuk mendukung agenda tersebut telah ditetapkan Sebelas Prioritas Nasional mensikapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;

4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

7.2.2. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

Sesuai dengan RTRWN, pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan pada:

1. *Mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu* sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air;
2. *Mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil* sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
3. *Meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir* yang menghubungkan poros Banda Aceh – Atambua, sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat;
4. *Meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan* (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan *mengembangkan jalur wisata terpadu Bali – Lombok – Komodo – Tana Toraja*;
5. *Menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya*, yang berorientasi ekspor, dengan mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama baik antarwilayah maupun antarkawasan;
6. *Memfaatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional* baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerjasama ekonomi sub-regional;

7. *Meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional* di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara;
8. Mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai 'beranda depan' Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. *Pusat pengembangan di Wilayah Nusa Tenggara yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)* diarahkan untuk mendorong pengembangan *kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer* yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

7.3.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 2013-2018

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan tersebut diatas, kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018, sebagaimana tabel 7.1.

Mencermati tabel kebijakan umum dan program prioritas 2013-2018, dirumuskan ada 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan tersebut, adalah:

1. Budipekerti Luhur
2. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Kesejahteraan Sosial
6. Agroindustri dan Ketahanan Pangan
7. Wirausaha dan Iklim Investasi
8. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
10. Lingkungan Hidup, Perubahan iklim dan Bencana Alam

Adapun sinergi antara prioritas pembangunan tersebut dengan arah kebijakan dan program pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 – 2018 sebagaimana tabel 7.2.

7.3.2 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

a. Struktur Ruang Wilayah

Fungsi Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2009-2029 sebagai kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata. Kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata diwujudkan melalui:

- a. Revitalisasi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
- b. Akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- c. Akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya;
- d. Akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga dan kerajinan;
- e. Akselerasi pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan; dan
- f. Pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

Berdasarkan struktur ruang wilayah, Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan: *pertama*, Wilayah Pengembangan Pulau Lombok mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Pulau Lombok dengan pusat pengembangan di Kota Mataram sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Praya, *kedua* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat mencakup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan pusat pengembangan di Kota Sumbawa Besar sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), *ketiga* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur mencakup Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima dengan pusat pengembangan di Kota Bima sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan ibukota kabupaten lainnya dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha. Sedangkan PKL berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, PotoTano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera dan Sape.

Sistem jaringan transportasi nasional yang ada di wilayah provinsi meliputi:

- a. sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- c. jaringan jalan nasional terdiri dari jalan arteri primer dan jalan kolektor primer;

- d. jaringan prasarana terdiri dari Terminal Penumpang Kelas A berada di Mataram, Gerung, Sumbawa Besar dan Raba;
- e. pelabuhan pengumpul berada di Lembar, Labuhan Lombok, dan Bima;
- f. pelabuhan penyeberangan lintas provinsi berada di Lembar, Bima dan Sape;
- g. pelabuhan perikanan nusantara (PPN) berada di Teluk Awang;
- h. bandar udara pusat pengumpul skala sekunder berada di Selaparang/Praya; dan
- i. bandar udara pusat pengumpul skala tersier berada di Muhammad Salahuddin Bima.

Sistem jaringan transportasi provinsi meliputi:

- a. Sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jaringan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
- b. Jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- c. Jaringan jalan provinsi, meliputi: jalan lintas utama Pulau Lombok, jalan lintas utama Pulau Sumbawa, jalan lintas utara Pulau Lombok, jalan lintas selatan Pulau Lombok, jalan lintas utara Pulau Sumbawa dan jalan lintas selatan Pulau Sumbawa;
- d. Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, meliputi: terminal penumpang Kelas B berada di Tanjung, Praya, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha;
- e. Pelabuhan pengumpan berada di Bangsal Pemenang, Labuhan Haji, Tanjung Luar, Benete, Badas, Calabai, Kempo, Waworada, Cempi, dan Sape;
- f. Pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota berada di Labuhan Lombok, Telong-elong, Pototano, Benete, Pulau Moyo, Lua Air;
- g. Pelabuhan khusus penumpang berada di pesisir pantai Kota Mataram; dan
- h. Bandar udara pusat pengumpan berada di Brang Biji dan Sekongkang.
- i. Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang melintasi Selat Lombok.

Sistem jaringan energi dan kelistrikan terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE).

Sistem prasarana sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi :

- a. Wilayah Sungai (WS) strategis nasional adalah WS Pulau Lombok yang meliputi Daerah Aliran sungai (DAS) Dodokan, DAS Menanga, DAS Putih dan DAS Jelateng;
- b. Sistem jaringan irigasi nasional meliputi: Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, Bendungan Mamak, Bendungan Batu Bulan, Bendungan Tiu Kulit, Bendungan Gapit, Bendungan Pelaparado, Bendungan Sumi, dan Bendungan Plara; dan
- c. Daerah Irigasi (DI) nasional meliputi : DI nasional lintas kabupaten/kota dan DI nasional utuh kabupaten/kota.

Sistem jaringan prasarana sumberdaya air provinsi terdiri dari :

1. WS Sumbawa meliputi:DAS Moyo Hulu, DAS Rhee, DAS Jereweh, DAS Beh, DAS Bako, DAS Ampang, dan DAS Moyo.
2. WS Bima-Dompu meliputi:DAS Baka, DAS Hoddo, DAS Banggo, DAS Parado, DAS Rimba dan DAS Sari.
3. Cekungan Air Tanah (CAT) di Pulau Lombok meliputi: CAT Tanjung-Sambelia seluas sekitar 1.124 km², CAT Mataram-Selong seluas sekitar 2.366 km²; CAT di Pulau Sumbawa meliputi: CAT Pekat seluas sekitar 977 km², CAT Sumbawa Besar seluas sekitar 1.404 km², CAT Empang seluas sekitar 345 km², CAT Dompu seluas sekitar 375 km², CAT Sanggar-Kilo seluas sekitar 1.419 km², CAT Bima seluas sekitar 1.102 km² dan CAT Tawali-Sape seluas sekitar 363 km².

Sistem jaringan prasarana persampahan provinsi meliputi:

- a. Tempat Pembuangan Akhir Kebon Kongok (Kab. Lombok Barat) dengan sistem sanitary landfill.
- b. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir lintas kabupaten/kota lainnya.

Sistem jaringan prasarana sanitasi wilayah meliputi :

- a. Sistem perpipaan air limbah provinsi di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat);
- b. Instalasi pengolahan air limbah di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat); dan
- c. Pengembangan instalasi pengolahan air limbah lintas kabupaten/kota lainnya.

b. Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pola ruang wilayah provinsi meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya wilayah provinsi. Kawasan lindung nasional yang terkait dengan wilayah provinsi meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya nasional meliputi Hutan Lindung, dan Kawasan resapan air;
- b. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional meliputi: Cagar Alam (CA.), Suaka Margasatwa (SM.), Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani, Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa dan Taman Wisata Alam (TWA); dan
- c. Kawasan lindung nasional lainnya adalah Taman Buru (TB) Pulau Moyo dan Taman Buru (TB) Tambora Selatan.

Kawasan lindung provinsi meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi: hutan lindung dan kawasan resapan air;
- b. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional;
- c. Kawasan lindung lainnya provinsi meliputi : rencana pengembangan cagar biosfer/ramsar/taman buru/kawasan perlindungan plasma nutfah/kawasan pengungsian satwa/ terumbu karang/kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut;
- d. Kawasan perlindungan setempat meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan ruang terbuka hijau kota; dan
- e. Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan wilayah provinsi meliputi :

- a. Kawasan Andalan terdiri dari:
 1. Kawasan Andalan Lombok dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, dan pertambangan;
 2. Kawasan Andalan Sumbawa dan sekitarnya dengan sektor unggulan: pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan perikanan;
 3. Kawasan Andalan Bima dan sekitarnya dengan sektor unggulan: pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan pertambangan.
- b. Kawasan Andalan Laut adalah Kawasan Andalan Perairan Selat Lombok dengan sektor unggulan : perikanan laut dan pariwisata.

Kawasan budidaya provinsi meliputi :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan terbatas;

- b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berada di kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan kawasan pertanian hortikultura;
- c. Kawasan peruntukan perkebunan berada di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBun):Sekotong, Gerung, Gangga, Bayan, Kopang, Pujut, Terara,Pringgabaya, Utan Rhee, Batulanteh, Sorinomo, Tambora, Sumbawa,Kayangan, dan Wera dan kawasan pengembangan tanaman komoditi unggulan;
- d. Kawasan peruntukan peternakan berada tersebar di wilayah provinsi untuk alokasi peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak,penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan berada pada zona tertentu di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa;
- f. Kawasan peruntukan pariwisata sebanyak 16 (enam belas) kawasan berada di:a. Pulau Lombok, meliputi: Senggigi dan sekitarnya, Suranadidan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Benang Stokel dansekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya; Selong Belanak dansekitarnya, Kuta dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya; GiliIndah dan sekitarnya, Gunung Rinjani dan sekitarnya; dan di Pulau Sumbawa, meliputi: Maluk dan sekitarnya; Pulau Moyodan sekitarnya; Hu’u dan sekitarnya, Teluk Bima dan sekitarnya,Sape dan sekitarnya; Gunung Tambora dan sekitarnya;
- g. Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil berada di Pulau Lombok, meliputi: Gili Indah dan sekitarnya, Senggigi dan sekitarnya, Lembar dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Teluk Sepi dan sekitarnya, Kuta, Awang dan sekitarnya, Tanjung Luar dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya, dan Labuhan Lombok dan sekitarnya; dan Pulau Sumbawa, meliputi: Alas - Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya ; Teluk Saleh dan sekitarnya;dan Labuhan Lalar, Maluk dan sekitarnya; Teluk Sanggar dan sekitarnya; Teluk Cempi dan sekitarnya; Waworadadan sekitarnya; Teluk Bima dan sekitarnya; dan Sape dansekitarnya;
- h. Kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a. Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu,

- Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE; dan
- b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang.

C. Pengembangan Kawasan Strategis

- Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pariwisata;
 - b. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
 - c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri, dan pariwisata;
 - d. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
 - e. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
 - f. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;
 - g. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
 - h. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri;
 - i. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;
 - j. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan;
 - k. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;
 - l. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

- a. Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
- b. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
- c. Kawasan Ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima; dan
- d. Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima.

Sesuai kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah pesisir dan laut Provinsi NTB dikelompokkan ke dalam 18 (delapan belas) kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Gili Indah dan sekitarnya
2. Kawasan Senggigi dan sekitarnya
3. Kawasan Labuan Lembar dan sekitarnya
4. Kawasan Gili Gede dan sekitarnya
5. Kawasan Teluk Sepi dan sekitarnya
6. Kawasan Kuta dan sekitarnya
7. Kawasan Teluk Ekas dan Teluk Serewe dan sekitarnya
8. Kawasan Tanjung Luar dan sekitarnya
9. Kawasan Labuan Lombok dan sekitarnya
10. Kawasan Gili Sulat dan sekitarnya
11. Kawasan Maluk dan sekitarnya
12. Kawasan Pantura Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya
13. Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya
14. Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya
15. Kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya
16. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya
17. Kawasan Sape dan sekitarnya
18. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya





